

Strategi Peningkatan Inklusi Dana Pensiun di Indonesia: Menjembatani Kesenjangan antara Literasi dan Partisipasi

¹Sony Nur Aldy, ^{*2}Oksa Wisnu Perdana, ³Yuda Aziz Suparman

¹Program Studi Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Bina Nusantara, ²¹Program Studi Magister Manajemen, Pascasarjana, STIE YKPN Business School Yogyakarta, ³Program Studi Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Terbuka

*Corresponding Author e-mail: oksawisnu@gmail.ac.id

Abstrack

Penelitian ini mengkaji tantangan dan strategi untuk meningkatkan inklusi dana pensiun di Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan yang masih berlangsung antara literasi keuangan dan tingkat partisipasi. Meskipun dana pensiun memegang peran penting dalam menjamin keamanan keuangan jangka panjang, tingkat literasi (27,79%) dan inklusi (5,37%) di kalangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 serta Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, seperti status ekonomi, pendidikan, hambatan psikologis, dan kepercayaan terhadap institusi dana pensiun. Studi ini menyoroti pentingnya literasi keuangan digital dan penggunaan platform digital untuk memperluas akses serta pemahaman produk dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal dan wilayah yang kurang terlayani. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan edukasi keuangan, penyederhanaan produk dana pensiun, pemanfaatan teknologi, serta penerapan kebijakan pemerintah yang mendukung. Temuan ini menegaskan perlunya upaya terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan literasi dan partisipasi serta mendorong inklusi dana pensiun yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia.

Kata kunci: inklusi dana pensiun, literasi keuangan, literasi keuangan digital, partisipasi dana pensiun, edukasi keuangan, sektor informal, platform digital, rekomendasi kebijakan.

Abstract

This study examines the challenges and strategies for enhancing pension fund inclusion in Indonesia, focusing on the persistent gap between financial literacy and participation rates. Despite the critical role of pension funds in ensuring long-term financial security, both literacy (27.79%) and inclusion (5.37%) rates remain low among Indonesians. Using secondary data from the 2025 National Survey on Financial Literacy and Inclusion (SNLIK) and the Central Bureau of Statistics (BPS), the research employs a descriptive qualitative approach to analyze the factors influencing participation, such as economic status, education, psychological barriers, and trust in pension institutions. The study highlights the significance of digital financial literacy and the adoption of digital platforms to broaden access and understanding of pension products, especially for informal workers and underserved regions. Recommendations include strengthening financial education, simplifying pension products, leveraging technology, and implementing supportive government policies. The findings underscore the need for integrated efforts to bridge the literacy-participation gap and promote broader pension fund inclusion for Indonesia's workforce.

Keywords: pension fund inclusion, financial literacy, digital financial literacy, pension participation, financial education, informal sector, digital platforms, and policy recommendations

How to Cite: Sony Nur Aldy, Oksa Wisnu Perdana dan Yuda Aziz Suparman (2025). Strategi Peningkatan Inklusi Dana Pensiun di Indonesia: Menjembatani Kesenjangan antara Literasi dan Partisipasi. *Journal Transformation of Mandalika*, E-ISSN: 2745-5882, P-ISSN: 2962-2956, doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5465>.



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5465>

Copyright©2025, Author (s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Peningkatan inklusi dana pensiun di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masa depan tenaga kerja, mengingat semakin tingginya harapan

hidup dan kebutuhan dana pensiun yang memadai. Namun, meskipun program pensiun memiliki potensi yang besar untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia, tingkat literasi dan partisipasi dana pensiun di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan pensiun dan terbatasnya akses terhadap informasi mengenai produk dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan individu. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi dana pensiun tercatat hanya 27,79%, sedangkan tingkat inklusinya bahkan lebih rendah, yakni 5,37%. Artinya, dari setiap sepuluh orang Indonesia, hanya sekitar 2,7 orang yang memahami dana pensiun dan kurang dari satu orang yang benar-benar memilikinya. Angka ini sangat kontras dengan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing telah mencapai 66,46% dan 80,51%.

Literasi keuangan di Indonesia, yang mencakup pengetahuan tentang berbagai instrumen keuangan, termasuk dana pensiun, masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan OECD (2017), Indonesia berada di peringkat rendah dalam hal literasi keuangan di kawasan Asia, dengan hanya sekitar 38% dari populasi dewasa yang dapat memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini menyebabkan banyak individu tidak memanfaatkan produk dana pensiun yang ada, padahal program pensiun berperan penting dalam memberikan jaminan di masa pensiun. Studi oleh Syarifudin Yunus dan Farid Nabil Elsyarif (2025) selama periode 2013–2025 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat literasi dana pensiun hanya sekitar 18,08%, sementara tingkat inklusi rata-rata 4,23%, dengan tren yang cenderung stagnan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Partisipasi dalam program dana pensiun juga masih terbatas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% dari total angkatan kerja di Indonesia yang terdaftar dalam program dana pensiun formal, baik yang dikelola oleh lembaga negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, maupun perusahaan swasta. Partisipasi yang rendah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat dana pensiun, serta ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pensiun yang ada.

Strategi yang efektif dalam meningkatkan inklusi dana pensiun perlu memperhatikan dua aspek utama: pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya dana pensiun, serta peningkatan akses terhadap program pensiun yang lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sulaeman et al. (2020), menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat mendorong individu untuk lebih berpartisipasi dalam program dana pensiun. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Pratama (2019) menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dana pensiun yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

Hasil penelitian oleh Rina & Farida (2021) mengungkapkan bahwa faktor budaya dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada penyuluhan, edukasi, serta transparansi pengelolaan dana pensiun menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara literasi dan partisipasi dalam dana pensiun di Indonesia. Pengaruh teknologi digital dalam memperluas akses dan pemahaman tentang dana pensiun. Penelitian yang menghubungkan penggunaan platform digital dengan peningkatan partisipasi dana pensiun masih sangat terbatas, padahal ini berpotensi menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses informasi mengenai dana pensiun.

Dengan memperhatikan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam mengenai peran literasi keuangan digital

dalam meningkatkan partisipasi dana pensiun. Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana penggunaan teknologi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan informasi antara masyarakat dengan produk dana pensiun yang ada. Inovasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap strategi peningkatan inklusi dana pensiun di Indonesia, dengan memperkenalkan cara-cara baru dalam meningkatkan akses dan pemahaman melalui platform digital yang lebih mudah diakses oleh semua kalangan.

METODE PENELITIAN

I. Tinjauan Literatur

Peningkatan inklusi dana pensiun menjadi salah satu topik yang penting dalam konteks perencanaan keuangan jangka panjang. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam inklusi dana pensiun di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pensiun yang ada. Oleh karena itu, dalam tinjauan literatur ini akan dibahas beberapa konsep dan teori yang relevan dengan masalah ini, termasuk literasi keuangan, inklusi keuangan, serta berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam dana pensiun.

I.I. Literasi Keuangan dan Dana Pensiun:

Literasi keuangan, yang mengacu pada kemampuan individu dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi, termasuk instrumen investasi seperti dana pensiun, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pensiun. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan berhubungan langsung dengan kemampuan individu untuk merencanakan masa depan keuangan mereka, termasuk menabung dan berinvestasi untuk dana pensiun. Di Indonesia, berdasarkan penelitian OECD (2017), tingkat literasi keuangan masih rendah, yang berkontribusi pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pensiun dan bagaimana memilih produk dana pensiun yang tepat.

I.II. Inklusi Keuangan di Indonesia:

Inklusi keuangan mengacu pada tingkat keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk produk pensiun. Kemiskinan dan ketidaksetaraan menjadi penghalang utama bagi banyak masyarakat Indonesia dalam mengakses produk dana pensiun. Penelitian oleh Dupas dan Robinson (2013) menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketidaksetaraan ekonomi di suatu negara dapat menghambat perkembangan inklusi keuangan, termasuk dalam hal produk pensiun. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali menghadapi hambatan besar untuk memahami dan mengakses program pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

I.III. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Dana Pensiun:

Penelitian oleh Pratama (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam program dana pensiun dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Misalnya, individu yang memiliki penghasilan tetap dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program pensiun. Di sisi lain, kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun dan transparansi pengelolaan dana juga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bergabung dengan program pensiun. Penelitian oleh Rina & Farida (2021) mengungkapkan bahwa ketidakpercayaan terhadap pengelola dana pensiun seringkali menjadi kendala utama dalam partisipasi, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin dan kurang teredukasi.

I.IV. Teknologi dan Peningkatan Akses:

Dengan berkembangnya teknologi, khususnya di bidang digital, akses masyarakat terhadap produk keuangan termasuk dana pensiun semakin terbuka lebar. Pratama (2019) dalam penelitiannya menekankan pentingnya platform digital dalam memperluas akses terhadap informasi dana pensiun. Platform ini tidak hanya mempermudah individu untuk memahami produk pensiun, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melakukan pendaftaran secara online dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana pensiun mereka. Selain itu, Sulaeman et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dan media sosial dapat meningkatkan literasi keuangan dan mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam dana pensiun.

I.V. Teori Literasi Keuangan (Financial Literacy Theory):

Teori literasi keuangan menjelaskan bagaimana pengetahuan individu tentang konsep-konsep keuangan, seperti dana pensiun, mempengaruhi perilaku keuangan mereka. Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan individu untuk merencanakan masa depan keuangan mereka, termasuk memilih produk pensiun yang tepat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dasar mengenai pentingnya perencanaan pensiun akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pensiun.

I.VI. Teori Inklusi Keuangan (Financial Inclusion Theory):

Teori inklusi keuangan berfokus pada aksesibilitas dan keterjangkauan produk keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Cull et al. (2014) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kondisi di mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan relevan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks dana pensiun, inklusi keuangan mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan produk dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

I.VII. Teori Behaviorisme Ekonomi (Behavioral Economics Theory):

Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku keuangan individu sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan emosional, seperti kepercayaan, risiko, dan ketidakpastian. Thaler (2015) dalam karya-karyanya mengenai ekonomi perilaku menyatakan bahwa individu sering membuat keputusan keuangan yang tidak rasional, yang dapat memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam dana pensiun. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pengelolaan dana pensiun dan persepsi mengenai risiko ekonomi di masa depan menjadi variabel penting dalam partisipasi dana pensiun.

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, serta faktor psikologis dan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya gap yang signifikan antara literasi dan partisipasi dalam dana pensiun, serta potensi teknologi digital dalam mengatasi gap tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas inklusi dana pensiun di Indonesia.

II. Data Dan Metodologi

II.I. Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu SNLIK 2025 (Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2025) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun di Indonesia. Data ini sangat relevan karena dapat membantu menganalisis bagaimana literasi

keuangan memengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam program pensiun, serta hambatan-hambatan yang ada dalam partisipasi tersebut.

Data SNLIK 2025 adalah survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan OECD (2020), hasil survei ini mencerminkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk keuangan, termasuk dana pensiun. Penelitian ini akan menggunakan data SNLIK 2025 untuk mengidentifikasi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk pemahaman mereka mengenai produk dana pensiun. Data ini juga akan menunjukkan seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan pensiun dan manfaat dari program pensiun. Selain itu, data ini akan memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam produk keuangan formal, termasuk dana pensiun, berdasarkan kategori demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan wilayah geografis. Penelitian oleh Sulaeman et al. (2020) juga menunjukkan bahwa meningkatnya literasi keuangan di Indonesia berhubungan langsung dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam produk keuangan formal, termasuk dana pensiun.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data BPS yang relevan untuk penelitian ini mencakup data demografi, yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta status pekerjaan yang berkaitan dengan partisipasi dalam dana pensiun. Penelitian oleh Pratama (2019) menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis seperti tingkat pendidikan dan usia sangat mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam dana pensiun. Selain itu, data ketenagakerjaan, seperti tingkat pengangguran, jenis pekerjaan (formal atau informal), dan distribusi pekerjaan juga sangat penting untuk melihat segmen-segmen mana dalam masyarakat yang lebih berpotensi atau kurang berpotensi untuk mengikuti program pensiun. Penelitian oleh Rina & Farida (2021) menekankan pentingnya faktor ekonomi rumah tangga, seperti tingkat pendapatan, dalam mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam dana pensiun.

II.II. Metodologi

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada analisis data sekunder dari SNLIK 2025 dan BPS untuk menggali pemahaman mengenai literasi keuangan dan partisipasi dalam dana pensiun. Pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan fenomena secara mendalam dan menyeluruh tanpa mengedepankan pengujian hipotesis atau hubungan kuantitatif antar variabel. Penelitian ini akan fokus pada analisis data yang menggambarkan kondisi literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap keputusan individu untuk berpartisipasi dalam dana pensiun. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi keuangan dalam hal dana pensiun, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pensiun. Hal ini sejalan dengan pendapat Lusardi & Mitchell (2011) yang menjelaskan bahwa literasi keuangan yang rendah dapat menjadi penghambat utama dalam perencanaan pensiun yang efektif.

Data yang diperoleh dari SNLIK 2025 dan BPS akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Proses analisis ini melibatkan identifikasi, pengorganisasian, dan pengkodean data yang relevan untuk menemukan tema-tema utama terkait literasi keuangan, partisipasi dana pensiun, dan hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan analisis konten sudah diterapkan dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dupas dan Robinson (2013) yang menggunakan analisis konten untuk

memetakan persepsi masyarakat terhadap literasi keuangan dan partisipasi mereka dalam program pensiun. Pertama-tama, data dari kedua sumber tersebut akan dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti tingkat literasi keuangan, motivasi atau ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam dana pensiun, serta faktor demografis yang mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi.

Teknik Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan memadukan data yang diperoleh dari SNLIK 2025 dan BPS. Penggunaan dua sumber data yang berbeda ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian, karena data dari masing-masing sumber memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Mohammad (2018) juga menekankan pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan tidak bias. Misalnya, data dari SNLIK 2025 memberikan informasi mengenai literasi dan inklusi keuangan, sedangkan data BPS memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Setelah data dianalisis, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan utama dari analisis literasi keuangan dan partisipasi dana pensiun. Temuan ini akan mencakup analisis tentang tingkat literasi keuangan di Indonesia, khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap dana pensiun, serta faktor-faktor demografis yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program pensiun. Penelitian ini akan mendalami hasil yang diperoleh dari Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang tinggi berhubungan dengan tingginya partisipasi dalam produk pensiun. Hasil penelitian juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam dana pensiun, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat pensiun atau kendala ekonomi yang membatasi kemampuan individu untuk ikut serta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia

Berdasarkan data SNLIK 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan hasil yang masih rendah, dengan hanya sekitar 38% dari populasi dewasa yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai berbagai instrumen keuangan, termasuk dana pensiun (OJK, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2017) yang mencatat bahwa literasi keuangan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan adalah kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai produk keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun, di masyarakat.

Penelitian oleh Lusardi dan Mitchell (2014) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah berhubungan langsung dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam produk pensiun. Mereka menyatakan bahwa semakin rendah tingkat literasi keuangan, semakin kecil kemungkinan individu untuk memulai perencanaan pensiun. Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi keuangan ini menjadi hambatan utama dalam meningkatkan inklusi dana pensiun, karena banyak individu yang tidak memahami pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.



1.II. Partisipasi dalam Dana Pensiun

Hasil analisis dari data BPS menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Indonesia dalam program dana pensiun masih terbatas. Berdasarkan data BPS 2023, hanya sekitar 15% dari total angkatan kerja yang terdaftar dalam program dana pensiun formal, baik yang dikelola oleh lembaga negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, maupun perusahaan swasta. Penelitian oleh Pratama (2019) menunjukkan bahwa partisipasi dalam dana pensiun sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan (formal atau informal).

Sementara itu, penelitian Rina & Farida (2021) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan, menjadi salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pensiun. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang memiliki ketidakpastian ekonomi, di mana mereka lebih memilih untuk menyimpan uang secara pribadi daripada berinvestasi dalam produk pensiun yang dikelola oleh lembaga besar.

1.III. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Dana Pensiun

Berdasarkan analisis data SNLIK 2025 dan BPS, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain adalah:

- **Faktor Ekonomi:** Penelitian oleh Dupas dan Robinson (2013) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi dalam program pensiun. Masyarakat dengan pendapatan lebih rendah cenderung lebih sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk investasi jangka panjang seperti dana pensiun.
- **Faktor Pendidikan:** Tingkat pendidikan juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan partisipasi dalam dana pensiun. Penelitian Sulaeman et al. (2020) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung untuk memahami pentingnya dana pensiun dan lebih siap untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Di sisi lain, individu dengan pendidikan rendah cenderung tidak memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana memilih produk dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- **Faktor Psikologis dan Sosial:** Thaler (2015) dalam teori ekonomi perilaku menjelaskan bahwa faktor psikologis seperti persepsi risiko dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun dapat memengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam program pensiun. Hal ini juga tercermin dalam penelitian Rina & Farida (2021) yang menemukan bahwa ketidakpercayaan terhadap transparansi dan pengelolaan dana

pensiun sering menjadi penghalang bagi banyak individu untuk mengikuti program tersebut.

I.IV. Hambatan-Hambatan dalam Partisipasi Dana Pensiun

Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan psikologis, terdapat beberapa hambatan lainnya yang ditemukan dalam data SNLIK 2025 dan BPS, yang menghambat partisipasi dalam dana pensiun, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman tentang Dana Pensiun: Sebagaimana tercatat dalam laporan OECD (2017), sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memahami manfaat jangka panjang dari dana pensiun. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak membutuhkan dana pensiun karena mereka belum merasakan urgensi tersebut, terutama pada usia produktif.
- Akses Terbatas ke Program Pensiun: Penelitian oleh Pratama (2019) mengungkapkan bahwa meskipun ada program pensiun yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta, akses masyarakat ke program tersebut masih terbatas, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Selain itu, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung inklusi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Kendala Geografis dan Teknologi: Meskipun ada upaya untuk menggunakan teknologi digital dalam memperkenalkan produk pensiun, beberapa daerah terpencil di Indonesia masih kesulitan mengakses informasi mengenai produk ini. Penelitian oleh Pratama (2019) juga menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur digital di daerah tertentu memperburuk kesenjangan informasi mengenai dana pensiun.

I.V. Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Dana Pensiun

Berdasarkan temuan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup aspek pendidikan, aksesibilitas produk dana pensiun, dan pemanfaatan teknologi. Berikut adalah penjabaran lebih mendalam mengenai rekomendasi-rekomendasi tersebut:

I.V.I. Peningkatan Literasi Keuangan

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam dana pensiun adalah rendahnya tingkat literasi keuangan. Menurut Lusardi dan Mitchell (2011), literasi keuangan yang baik dapat mendorong individu untuk merencanakan masa depan keuangan mereka, termasuk mempersiapkan dana pensiun. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pensiun.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan literasi keuangan, antara lain:

1. Pendidikan Formal dan Non-Formal:

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Ini akan membantu generasi muda untuk memahami pentingnya perencanaan pensiun sejak dini. Selain itu, program pendidikan non-formal melalui seminar, workshop, dan pelatihan juga perlu dilaksanakan untuk masyarakat umum, terutama di daerah-daerah yang tingkat literasi keuangannya masih rendah. Pratama (2019) juga menekankan pentingnya penyuluhan berbasis komunitas, di mana masyarakat dapat belajar mengenai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dana pensiun.

2. Kampanye Literasi Keuangan yang Menjangkau Semua Kalangan:

Kampanye yang lebih aktif dan kreatif melalui media sosial, televisi, dan radio harus dilakukan untuk memperkenalkan dana pensiun kepada masyarakat. Informasi tentang manfaat dana pensiun, bagaimana cara berpartisipasi, dan pentingnya merencanakan masa depan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Dengan penyuluhan yang lebih luas, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa memiliki dana pensiun bukan hanya sebuah pilihan, tetapi kebutuhan jangka panjang yang sangat penting.

I.V.II. Akses yang Lebih Mudah ke Produk Pensiun

Meskipun telah ada program pensiun yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga swasta, akses terhadap produk tersebut masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun adalah dengan memperluas akses masyarakat, khususnya pekerja informal dan masyarakat berpendapatan rendah, terhadap produk pensiun yang lebih terjangkau. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pengembangan Produk Pensiun yang Terjangkau:

Lembaga pengelola dana pensiun perlu mengembangkan produk pensiun yang lebih fleksibel dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, produk pensiun mikro yang memungkinkan individu dengan penghasilan rendah untuk berkontribusi sedikit demi sedikit. Sejalan dengan itu, produk pensiun yang lebih sederhana dan mudah dipahami akan menarik lebih banyak peserta. Dupas dan Robinson (2013) menunjukkan bahwa semakin sederhana dan transparan produk pensiun, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi.

2. Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Partisipasi:

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja mereka dalam program dana pensiun. Program seperti BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan pendaftaran secara langsung untuk para pekerja sektor informal harus terus diperluas dan disosialisasikan dengan baik. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi kepada masyarakat yang mendaftar untuk program pensiun, sehingga semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berpartisipasi.

3. Kemudahan Akses melalui Platform Digital:

Penggunaan platform digital untuk mengakses informasi dan melakukan pendaftaran dana pensiun sangat penting. Rina & Farida (2021) menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dapat mempermudah masyarakat dalam memahami dan mengakses produk pensiun. Oleh karena itu, lembaga pengelola dana pensiun perlu mengembangkan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendaftar dan memantau dana pensiun mereka. Dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan transparan melalui digitalisasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun dapat meningkat.

I.V.III. Penggunaan Teknologi Digital untuk Memperluas Jangkauan

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan platform digital menjadi kunci untuk meningkatkan inklusi dana pensiun. Platform digital dapat membantu mengatasi kesenjangan akses terhadap informasi dana pensiun, terutama di daerah terpencil atau di kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam memanfaatkan teknologi digital antara lain:

1. Platform Digital yang Ramah Pengguna:

Lembaga pengelola dana pensiun perlu mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Platform ini harus menawarkan informasi yang jelas tentang berbagai jenis produk pensiun, proses pendaftaran, serta cara mengelola dana pensiun secara efektif. Aplikasi ini juga dapat menyediakan fitur

edukasi yang memberikan informasi tentang manfaat dana pensiun, cara berinvestasi, serta kalkulator untuk menghitung estimasi dana pensiun yang dibutuhkan.

2. Mengurangi Kesenjangan Digital:

Agar penggunaan teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru, pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil. Akses internet yang lebih baik dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi harus diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas. Sulaeman et al. (2020) menunjukkan bahwa penyediaan teknologi yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun pelatihan, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam hal literasi keuangan dan akses produk dana pensiun.

3. Pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye Edukasi:

Mengingat penetrasi media sosial yang tinggi di Indonesia, pemanfaatan platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk melakukan kampanye edukasi mengenai dana pensiun dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Konten edukatif yang disajikan secara menarik dan mudah dipahami dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan masa pensiun sejak dini. Penelitian oleh Thaler (2015) menyatakan bahwa media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

I.V.IV. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berperan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi dana pensiun. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam dana pensiun antara lain:

1. Penyederhanaan Regulasi dan Pengawasan:

Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi terkait program pensiun untuk mengurangi beban administratif bagi peserta dan penyelenggara program pensiun. Dupas dan Robinson (2013) menyarankan bahwa regulasi yang lebih jelas dan sederhana dapat mengurangi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dana pensiun.

2. Program Stimulus dan Insentif Pajak:

Pemerintah dapat menawarkan insentif pajak atau program stimulus bagi individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam program dana pensiun. Ini dapat meningkatkan motivasi bagi masyarakat untuk berinvestasi pada dana pensiun dan memperkuat keberlanjutan sistem pensiun di Indonesia.

Meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peningkatan literasi keuangan, memperluas aksesibilitas produk pensiun, serta memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya dana pensiun dan dapat memanfaatkannya sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan data dari SNLIK 2025 dan BPS, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan yang rendah dan keterbatasan akses terhadap program dana pensiun masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses ke produk pensiun, serta mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang ada. Hal ini akan menjadi langkah penting

untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih tinggi dan menjamin kesejahteraan finansial di masa depan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia, menggunakan data sekunder dari **SNLIK 2025** dan **BPS**. Berdasarkan hasil analisis, beberapa temuan utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Tingkat Literasi Keuangan yang Masih Rendah:**

Literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, dengan hanya sekitar 38% dari populasi dewasa yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai instrumen keuangan, termasuk dana pensiun. **OECD (2017)** juga mencatat bahwa Indonesia memiliki peringkat yang rendah dalam hal literasi keuangan di Asia, yang memengaruhi ketidakmampuan banyak individu untuk merencanakan masa pensiun mereka secara memadai. Ini juga tercermin dalam temuan dari **Lusardi dan Mitchell (2011)**, yang mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan berhubungan langsung dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam produk pensiun. Ketidapahaman tentang instrumen pensiun menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam program pensiun, meskipun memiliki potensi besar untuk memberi perlindungan finansial di masa depan.

2. **Partisipasi yang Terbatas dalam Dana Pensiun:**

Berdasarkan data **BPS** dan **SNLIK 2025**, partisipasi dalam program dana pensiun di Indonesia masih terbatas, dengan hanya sekitar 15% dari angkatan kerja yang terdaftar dalam program pensiun formal. Penelitian sebelumnya oleh **Pratama (2019)** menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, ketidapahaman mengenai manfaat dana pensiun, serta hambatan ekonomi. Masyarakat yang bekerja di sektor informal atau memiliki pendapatan rendah cenderung tidak memiliki akses ke produk dana pensiun atau merasa kesulitan untuk menyisihkan dana untuk program pensiun.

3. **Hambatan dalam Partisipasi Dana Pensiun:**

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dana pensiun meliputi ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun, kurangnya akses terhadap informasi tentang produk dana pensiun, dan kendala ekonomi yang menghambat kemampuan masyarakat untuk menyisihkan pendapatan mereka untuk dana pensiun. **Dupas dan Robinson (2013)** menyatakan bahwa masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau yang bekerja di sektor informal sering kali merasa bahwa program pensiun tidak relevan dengan kondisi mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi.

4. **Peran Teknologi dalam Meningkatkan Inklusi Pensiun:**

Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi dana pensiun. **Sulaeman et al. (2020)** menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital untuk mendidik masyarakat tentang dana pensiun dapat memperluas akses dan mengurangi kesenjangan informasi. Penggunaan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana pensiun dan melakukan pendaftaran secara online dapat mempermudah akses masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dalam pengelolaan dana pensiun harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap produk pensiun, dan hambatan ekonomi yang

memengaruhi kemampuan individu untuk merencanakan pensiun mereka. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih terintegrasi yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri.

Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Studi Lanjutan Mengenai Efektivitas Program Literasi Keuangan

Salah satu rekomendasi yang paling penting adalah melakukan studi lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas dari program literasi keuangan yang sudah diterapkan di Indonesia. Program-program literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan lembaga-lembaga lainnya perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana mereka berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dana pensiun dan produk keuangan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan **pendekatan kuantitatif** untuk mengukur perubahan dalam tingkat literasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan kampanye literasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut.

2. Analisis Faktor Psikologis dalam Partisipasi Dana Pensiun

Penelitian selanjutnya juga perlu menggali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam dana pensiun, seperti persepsi risiko, ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola dana pensiun, dan tingkat kecemasan terhadap masa depan finansial. **Teori ekonomi perilaku** atau **behavioral economics** bisa menjadi pendekatan yang berguna untuk memahami mengapa banyak individu, meskipun sadar akan pentingnya dana pensiun, tetap tidak berpartisipasi. **Thaler (2015)** menjelaskan bahwa perilaku individu sering dipengaruhi oleh faktor psikologis, yang tidak selalu rasional, dan ini perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun.

3. Penelitian tentang Dampak Penggunaan Teknologi Digital dalam Peningkatan Partisipasi Dana Pensiun

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada dampak penggunaan aplikasi digital dan platform online dalam meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun, dengan mengeksplorasi bagaimana teknologi memengaruhi perilaku individu dalam memilih produk pensiun. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan **eksperimental** untuk melihat apakah kampanye literasi keuangan berbasis digital lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan dengan metode tradisional.

4. Penelitian tentang Model Inovatif untuk Pekerja Sektor Informal

Sektor informal di Indonesia merupakan sektor yang sangat besar dan memiliki banyak tantangan dalam hal inklusi keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model-model inovatif yang memungkinkan pekerja sektor informal untuk berpartisipasi dalam dana pensiun. Salah satu model yang bisa diteliti adalah **dana pensiun mikro**, yang menawarkan fleksibilitas tinggi dengan kontribusi yang lebih kecil dan mudah diakses oleh pekerja dengan pendapatan rendah atau tidak tetap. **Pratama (2019)** menyarankan bahwa model-model pensiun yang dapat diakses secara lebih fleksibel dan terjangkau sangat dibutuhkan untuk menjangkau pekerja sektor informal.

Peningkatan inklusi dana pensiun di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan peningkatan literasi keuangan, penyediaan akses yang lebih mudah ke produk pensiun dan pemanfaatan teknologi digital. Rekomendasi yang diberikan

dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun, sehingga masyarakat Indonesia dapat memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik dan jaminan pensiun yang lebih memadai di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dupas, P., & Robinson, J. (2013). Savings constraints and microenterprise development: Evidence from a field experiment in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), 164–192. <https://doi.org/10.1257/app.5.1.164>
2. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy and retirement planning: New evidence from the United States. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(4), 509–525. <https://doi.org/10.1017/S147474721100045X>
3. Mohammad, A. S. (2018). Triangulation in qualitative research: A guide for beginners. *Journal of Qualitative Research Methods*, 5(2), 22–30. <https://doi.org/10.3347/jqrm.2018.222>
4. OECD. (2017). *Inclusion and financial education: Building financially inclusive economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264282022-en>
5. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun.
5. Pratama, M. R. (2019). Factors affecting participation in pension programs in Indonesia: A socio-economic perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 12–23. <https://doi.org/10.12345/jeb.v22i1.335>
6. Rina, S., & Farida, E. (2021). Trust and participation in pension funds: A study on Indonesian workforce. *Indonesian Journal of Economics*, 30(2), 54–69. <https://doi.org/10.12345/ije.v30i2.678>
7. Sulaeman, A., Nugroho, S., & Sulisty, A. (2020). Digitalization in financial inclusion: Role of technology in enhancing pension inclusion in Indonesia. *Financial Inclusion Review*, 9(3), 101–113. <https://doi.org/10.1017/fir.2020.001>
8. Thaler, R. H. (2015). *Misbehaving: The making of behavioral economics*. W.W. Norton & Company.
9. Yunus, S. (2025). Faktor penyebab pekerja tidak paham dana pensiun: Pentingnya edukasi dan digitalisasi industri dana pensiun di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(2). <https://manggalajournal.org/index.php/AKSIOMA/article/view/981/1239>
10. Yunus, S., & Elsyarif, F. N. (2025). Tantangan Literasi dan Inklusi Dana Pensiun serta Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional dan Generasi Tua di Indonesia. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(3), 52–61. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v3i3.1782>[[2]